

# KETIMPANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI DAERAH HASIL PEMEKARAN: STUDI KASUS DI PROVINSI BANTEN DAN GORONTALO

*(The Regional Disparities and Economic Development of Regencies/Municipalities  
in the Decentralized Regions: Case Study in Banten and Gorontalo Province)*

**Suhartono**

P3DI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik  
Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270  
Email: suhartonot@yahoo.com

Naskah diterima: 24 Februari 2015

Naskah direvisi: 11 Maret 2015

Naskah diterbitkan: 29 Juni 2015

## **Abstract**

*This research aims to analyze the regional disparities and economic development of regencies/municipalities in the decentralized regions. This research is conducted in the provinces of Banten and Gorontalo by using secondary data in the period of 2007-2011 and primary data collected through FGD and interview. The economic development is analysed by using Klassen Typology and regional disparities by using Theil Entropi index. This research shows that from 8 Banten's municipalities, there are four municipalities categorized as high growth-high income, one municipalities as low growth-high income, one regency as high growth-high income, and two regencies as low growth-low income. Meanwhile, in Gorontalo from six of its municipalities, there are two municipalities categorized as high growth-high income, two regencies as high growth-low income, and two regencies as low growth-low income. Banten has Theil index 3.96 and Gorontalo has Theil index 1.16. Banten has wider regional disparities compared to other regions outside Java. Regional disparities in Gorontalo are relatively similar with other regions outside Java. One of the factors that substantially contribute to wide disparities in Banten is the presence of centralized economy in Cilegon, which is situated in the municipality of Banten and known as the industrial area. Meanwhile, narrow disparity in Gorontalo is influenced by agriculture, a sector from which people in the area make a living. Therefore, the government should pay more attention on centralized economy, as it could be the main factor that determines the failure of a decentralization. One of the main factors that contributes to address issues related to disparities is to create a decentralization.*

*Keywords: decentralization, economic development, regional disparity, Klassen typology, Theil entropi index*

## **Abstrak**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antardaerah di daerah hasil pemekaran. Penelitian dilakukan di Provinsi Banten dan Gorontalo dengan menggunakan data sekunder tahun 2007-2011 dan data primer hasil wawancara dan FGD. Perkembangan ekonomi dianalisis dengan menggunakan tipologi Klassen, ketimpangan dengan indeks entropi *Theil*. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 8 kabupaten/kota, Banten terdapat empat daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, satu daerah maju tapi tertekan, satu daerah berkembang cepat, dan dua daerah relatif tertinggal. Sedangkan Gorontalo dari 6 kabupaten/kota terdapat dua daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, dua daerah berkembang cepat, dan dua daerah relatif tertinggal. Indeks entropi *Theil* Banten 3,96 dan Gorontalo 1,16. Sebagai daerah hasil pemekaran Banten memiliki ketimpangan paling tinggi, sedangkan Gorontalo sama dengan ketimpangan yang ada di daerah yang tidak dimekarkan terutama di luar Pulau Jawa. Salah satu penyumbang terbesar ketimpangan di Banten adanya pemusatan industri di Kota Cilegon. Sedangkan ketimpangan yang rendah di Gorontalo karena fokus pada pertanian yang merupakan sektor mayoritas masyarakat bekerja. Penelitian ini menyarankan pemerintah memperhatikan faktor pemusatan ekonomi, karena faktor ini dapat menjadikan kebijakan pemekaran gagal mewujudkan pemerataan sebagai salah satu tuntutan lahirnya pemekaran.

Kata kunci: pemekaran, pembangunan ekonomi, ketimpangan regional, tipologi Klassen, indeks entropi *Theil*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Reformasi telah mendorong penguatan kebijakan desentralisasi. Salah satunya melalui kebijakan pemekaran daerah. Alasannya, sentralitas yang dibangun pemerintah dalam pembangunan di masa orde baru telah menyebabkan ketimpangan regional antardaerah terutama antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur atau antara daerah di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa.

Bagi Indonesia sendiri, desentralisasi secara legalitas dimulai dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Dalam kerangka hukum tersebut telah menghasilkan enam provinsi baru hasil pemekaran dan 205 kabupaten/kota baru<sup>1</sup>. Desentralisasi sendiri dipilih oleh banyak negara dengan sejumlah alasan. Di Amerika Latin, desentralisasi menjadi bagian dari proses pendalaman demokrasi, sedangkan di Asia Timur sebagai usaha untuk memperbaiki pelayanan publik (Litvack, *et al.*, 1998). Ada yang didasarkan

<sup>1</sup> Data Departemen Dalam Negeri yang disampaikan di dalam FGD tanggal 24 September 2014.

pada demokratisasi di tingkat lokal, meningkatkan efisiensi dalam alokasi barang dan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan ekonomi.

Persoalannya, terlepas dari alasan politik terutama dalam kerangka menjaga dan mengkonsolidasikan proses demokratisasi di tingkat lokal dan menjaga hubungan antara pusat dan daerah, namun kinerja atau capaian pembangunan ekonomi dari daerah hasil pemekaran perlu dikritisi atau dikaji lebih mendalam. Salah satunya dari aspek perkembangan ekonomi dan kemampuannya mengatasi persoalan ketimpangan antardaerah. Di tengah beragamnya latar belakang dari lahirnya kebijakan desentralisasi, dalam konteks Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fenomena kesenjangan pembangunan di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa, serta antara daerah kaya sumber daya alam dengan yang tidak (Akita & Alisjachbana, 2002 dan Booth, 2000). Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa 90 persen kegiatan industri di Indonesia terserap di Jawa dan Sumatera sehingga pajak penghasilan juga terkonsentrasi di wilayah yang sama dan berdasarkan data pada tahun 1975-2004 terdapat kesenjangan yang sangat besar antara provinsi yang kaya dengan yang miskin dengan rasio 15,9 (antara Kalimantan Timur dan Maluku) dan 11,3 rasio pengeluaran rumah tangga antara daerah yang kaya dan miskin (antara Jakarta dengan NTB) (Kuncoro, 2009: 383).

Berangkat dari tujuan pemekaran untuk mensejahterakan masyarakat<sup>2</sup>, dan dengan didasarkan pada asumsi bahwa pemekaran dapat mempersingkat rentang kendali antara pemerintahan dengan masyarakat yang dilayaninya, memperbaiki pemerataan pembangunan, dan membuka kemungkinan mengalirnya sumber daya ke daerah yang belum berkembang, penelitian ini ingin menjawab apakah kebijakan pembentukan daerah otonomi baru dari perspektif pembangunan telah memenuhi tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk menguji seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan desentralisasi melalui kebijakan pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran<sup>3</sup>, penelitian ini mencoba menganalisis sisi pertumbuhan dan ketimpangan pembangunan ekonomi di daerah hasil pemekaran tersebut.

Untuk meneliti hal tersebut, penelitian ini mengambil studi di Provinsi Banten dan Gorontalo.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000.

<sup>3</sup> Dalam pengertian Depdagri (hasil FGD), daerah otonomi baru digunakan untuk daerah yang baru dimekarkan dengan umur di bawah 3 tahun, sedangkan daerah hasil pemekaran digunakan untuk menyebut daerah otonomi baru yang telah berumur lebih dari 3 tahun.

Provinsi Banten dan Gorontalo merupakan provinsi hasil pemekaran. Saat penelitian dilakukan kedua provinsi tersebut telah berusia lebih dari 10 tahun. Keduanya tentunya telah menghasilkan capaian pembangunan, sehingga bisa dikaji dan dibandingkan dengan daerah lainnya. Kemampuan membangun dan capaian pembangunan daerah hasil pemekaran menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dari kebijakan desentralisasi. Provinsi Banten dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat dengan UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Sedangkan Provinsi Gorontalo dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara didasarkan pada UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo tanggal 22 Desember 2000. Provinsi Banten merepresentasikan daerah di Pulau Jawa dan Provinsi Gorontalo daerah di luar Pulau Jawa. Kedua provinsi lahir dalam tahun yang sama. Dengan membandingkan pola perkembangan ekonomi dan ketimpangan regional diharapkan akan diperoleh gambaran kinerja daerah pemekaran dalam menggerakkan ekonominya dan mengatasi persoalan kesenjangan.

## B. Permasalahan

Kebijakan desentralisasi melalui pemekaran daerah dimaksudkan untuk salah satunya memberikan kewenangan kepada pemerintahan baru hasil pemekaran dalam mempercepat pembangunan dan mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan. Persoalannya bagaimana pola perkembangan ekonomi di daerah otonomi baru (Banten dan Gorontalo) setelah dimekarkan dan bagaimana kondisi ketimpangan regional di dua provinsi tersebut.

## C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, mengetahui pola perkembangan ekonomi seluruh kabupaten/kota yang menjadi bagian dari dua daerah yang masuk kategori daerah otonomi baru hasil dari pemekaran di UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. *Kedua* mengukur ketimpangan pendapatan regional dari kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut. *Ketiga* membandingkan pola perkembangan ekonomi dan ketimpangan regional antara dua provinsi hasil pemekaran yang satu berada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

## II. KERANGKA TEORI

Desentralisasi menjadi pilihan suatu negara untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Pemikiran ini berangkat dari salah satu elemen desentralisasi berupa pelimpahan sejumlah kewenangan pemerintah pusat kepada daerah. Pelimpahan ini menyebabkan daerah memiliki

kewenangan penuh dan jarak yang pendek antara pemerintah ke masyarakat untuk memberikan dan mendistribusikan barang dan pelayanan publik.

Kebijakan desentralisasi sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dalam bentuk pemekaran secara filosofis berkeinginan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dibangun di atas dasar asumsi bahwa pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru akan memperpendek rentang kendali pemerintahan dalam melayani masyarakatnya, mempercepat pemerataan, dan membuka peluang mengalirnya sumber daya untuk membangun daerah otonomi baru yang sebelumnya terisolir atau jauh dari pusat pertumbuhan.

Menurut pemikiran Rondinelli dan Cheema (1983: 14-16), desentralisasi memiliki sisi positif atau manfaat bagi masyarakat di daerah. Dari sisi pembangunan desentralisasi, *pertama* mengatasi keterbatasan pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan daerah. *Kedua*, desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi dalam pengambilan keputusan, karena tingkat pengambilan keputusan yang diserahkan ke pemerintah daerah akan mempersingkat proses pengambilan keputusan. *Ketiga*, pengambil kebijakan di tingkat daerah menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah. *Keempat*, desentralisasi akan mengefektifkan keterlibatan yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, ketika rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elite lokal, dan di sisi lainnya kemampuan pemerintah sangat terbatas. *Kelima*, desentralisasi membuka representasi kelompok masyarakat yang lebih luas di dalam proses perencanaan pembangunan dan kesempatan dalam alokasi sumber daya dan investasi pemerintah. *Keenam*, dengan menyediakan model alternatif cara pembuatan kebijaksanaan, desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang seringkali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan. Penelitian lain berdasarkan data di 30 negara menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki dampak negatif terhadap korupsi terutama di negara yang menganut sistem negara kesatuan dibanding negara federal (Gurgur & Shah, 2014).

Dalam praktiknya tidak semua kebijakan desentralisasi mencapai tujuannya, tetapi ada

yang mengalami kegagalan, ketika desentralisasi melahirkan desentralisasi korupsi, *rent seeker* atau berkembangnya *informal economy* atau *underground economy* sebagai akibat pengaruh penguasaan elit atau *elite capture* (Ratnawati, *et.al.*, 2007). Distorsi oleh kalangan elit setelah mendapat limpahan kewenangan dalam praktik desentralisasi memengaruhi capaian dari tujuan desentralisasi, karena elit memanfaatkan desentralisasi lebih untuk mencapai tujuan elit dan kelompoknya. Padahal untuk efektifitas implementasi kebijakan desentralisasi dibutuhkan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik, kelembagaan, politik, keuangan, dan peraturan hukum yang kondusif. Hal yang sama juga dibutuhkan untuk efektifitas pembangunan. Sebaliknya pembangunan yang efektif dapat memperkuat otonomi dan juga menurunkan derajat konflik, karena pembangunan secara efektif memberikan manfaat atau keuntungan ke daerah dan semua kelompok masyarakat termasuk kepada masyarakat yang sebelumnya masuk kategori miskin dan tertinggal, ketika sumber konflik terletak pada ketidakpuasan akibat kesenjangan.

Di sisi lainnya desentralisasi dinilai dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan mengurangi kualitas efisiensi dalam hal fungsi alokasi fiskal dan produksi serta tumbuhnya praktik korupsi (Prud'homme, 1995). Desentralisasi yang diterapkan di negara berkembang bila tidak dijalankan secara tepat, maka akan memberikan akibat buruk di dalam penerapannya.

Adanya distorsi dalam penerapan desentralisasi akan berpengaruh pada kemampuan daerah dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Keraguan akan kemampuan negara dalam membangun dan memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya secara konsisten dijelaskan oleh Kuznets dengan kurvanya yang menjelaskan bahwa daerah atau negara yang telah berkembang akan mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan dan selanjutnya turun (Acemoglu & Robinson, 2002). Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya memberikan landasan bagi keberlangsungan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Namun, ketika secara bersamaan terdapat pertumbuhan penduduk, maka negara atau daerah akan mengalami peningkatan konsumsi. Untuk memenuhi konsumsi itu negara atau daerah harus menghasilkan *output* sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan penambahan kesempatan kerja (fungsi distribusi pendapatan dan produksi) akan meningkatkan ketimpangan dalam penambahan pendapatan dan selanjutnya penduduk yang tidak terserap atau menganggur dalam proses produksi menjadi penduduk

miskin atau secara agregat daerah menjadi tertinggal. Pertumbuhan yang tidak merata di suatu daerah, dapat dipengaruhi oleh pemusatan atau gravitasi kegiatan ekonomi dan pertumbuhan pada salah satu daerah, sehingga daerah lainnya tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh secara bersamaan.

Untuk menganalisis lebih jauh kinerja pembangunan dari daerah otonomi baru dalam perspektif ruang telah dikembangkan sejumlah pendekatan. Salah satunya alat analisis yang dikembangkan oleh Klassen dengan menggunakan data pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, yang dikenal dengan tipologi Klassen. Dalam tipologi Klassen akan diperoleh empat karakteristik pola pertumbuhan dan struktur ekonomi yang berbeda, yaitu daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Aswandi & Kuncoro, 2002).

Sedangkan untuk mengukur tingkat kesenjangan dapat diukur dengan pendekatan konsentrasi spasial. Salah satunya dengan ukuran yang dikembangkan dalam konsep indeks entropi *Theil*. Ukuran ini sendiri dikembangkan dari teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi. Indeks entropi *Theil* dapat digunakan untuk membuat suatu perbandingan dalam kurun waktu tertentu dan menyediakan penjelasan secara rinci unit geografis yang lebih kecil. Bila indeks entropi mendekati nol maka pemerataan mendekati sempurna dan sebaliknya apabila menjauh dari nol maka ketimpangan semakin tinggi (Kuncoro, 2004: 136).

Penelitian tentang pola perkembangan ekonomi dan ketimpangan regional dengan menggunakan tipologi Klassen dan indeks entropi *Theil* sudah banyak dilakukan. Contohnya studi di Nusa Tenggara Barat dengan data tahun 2006-2009, di mana terdapat perbedaan kategori kemajuan pembangunan. Dari 11 kabupaten/kota, empat daerah masuk kategori relatif tertinggal, dua berkembang cepat, dua daerah maju tapi lamban tumbuh dan dua lagi cepat maju dan cepat tumbuh (Meilani & Wuryandani, 2012). Sedangkan dari sisi ketimpangan dilihat dari indeks entropi secara regional di Provinsi NTB tergolong tinggi mencapai 1,16. Studi yang sama dengan analisis Klassen dan indeks entropi *Theil*, terhadap data tahun 2003-2005 di Provinsi Riau yang memiliki 11 daerah kabupaten/kota, tiga di antaranya masuk kategori relatif tertinggal, empat daerah berkategori berkembang cepat, tiga daerah maju tapi lamban tumbuh dan satu daerah kategori maju dan cepat tumbuh (Caska & Riadi, 2008). Sedangkan dari sisi ketimpangan regional dengan menggunakan indeks entropi *Theil*, Provinsi

Riau juga memiliki indeks yang tinggi sebesar 1,16. Penelitian di Provinsi Jambi pada tahun 2001-2009, dari 10 daerah kabupaten/kota, satu masuk kategori cepat maju dan tumbuh, dua berkembang cepat, dua maju tetapi lamban tumbuh dan empat relatif tertinggal (Umiyati, 2012). Indeks entropi *Theil* rata-rata Provinsi Jambi pada kurun waktu tahun 2001-2009 berada pada kisaran 0,13 hingga 0,15.

Penelitian perkembangan ekonomi dan ketimpangan dengan menggunakan analisis Klassen baru dilakukan pada daerah-daerah yang dibentuk sebelum lahirnya kebijakan otonomi daerah berkembang dalam payung hukum UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Selain itu, sejumlah penelitian tersebut belum melakukan perbandingan antarprovinsi. Hasil penelitian tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menggambarkan kondisi dari daerah pemekaran di tingkat provinsi yang dilakukan dalam payung hukum kebijakan otonomi daerah. Selanjutnya penelitian ini melakukan perbandingan dengan menggunakan alat analisis yang sama seperti penelitian sebelumnya.

### III. METODOLOGI

#### A. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan cara mendatangi dan meminta data dari instansi terkait dan Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah penelitian. Data pada BPS daerah diharapkan mewakili gambaran data daerah secara lebih spesifik. Sedangkan untuk menganalisis lebih jauh diperlukan data kualitatif. Data kualitatif dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan petunjuk pertanyaan dan dengan *forum group discussion* (FGD). Narasumber atau informan dalam pengumpulan data kualitatif dipilih sesuai kemampuan dan keahlian terkait kebutuhan untuk menjelaskan lebih jauh terkait data yang dikumpulkan. Penelitian lapangan di Provinsi Gorontalo dilakukan pada April 2014 dan Provinsi Banten pada Juni 2014.

#### B. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data kuantitatif terkait dengan pola pertumbuhan dan ketimpangan digunakan teknik analisis Klassen dan Entropi *Theil*. Data hasil analisis tersebut diperdalam dengan analisis kualitatif yang dikumpulkan dengan wawancara dengan narasumber yang ditemui dalam penelitian lapangan. Data kualitatif digunakan untuk mendiskusikan dan menginterpretasikan hasil dari data kuantitatif yang dianalisis dengan analisis Klassen dan entropi *Theil*. Berikut penjelasan mengenai analisis yang digunakan dalam penelitian.

**Tabel 1.** Klasifikasi Wilayah menurut Tipologi Klassen

$r \backslash y$	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh	Daerah berkembang cepat
$r_i < r$	Daerah maju tapi lamban tumbuh	Daerah relatif tertinggal

Keterangan:

- $r_i$  : laju pertumbuhan ekonomi PDRB wilayah i.
- $y_i$  : PDRB per kapita wilayah i.
- $r$  : laju pertumbuhan ekonomi PDRB wilayah referensi.
- $y$  : PDRB per kapita wilayah referensi.

### B.1. Analisis Klassen

Klasifikasi daerah menurut Klassen dapat digambarkan dalam Tabel 1.

### B.2. Indeks Entropi Theil

$$I(y) = \sum \left( \frac{y_i}{y} \cdot \log \left[ \frac{\left( \frac{y_i}{y} \right)}{\left( \frac{x_i}{x} \right)} \right] \right) \dots \dots \dots (1)$$

Di mana:

- $I(y)$  : indeks entropi *Theil*.
- $Y_i$  : PDRB per kapita wilayah i.
- $Y$  : PDRB per kapita wilayah referensi.
- $X_i$  : jumlah penduduk kabupaten/kota i.
- $X$  : jumlah penduduk provinsi.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pola Perkembangan Ekonomi dan Ketimpangan Banten

Perkembangan ekonomi Provinsi Banten dapat dilihat dari perkembangan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonominya. PDRB per kapita menggambarkan produktivitas dari penduduknya dalam satu kurun waktu tertentu. Sedangkan data pertumbuhan PDRB menjadi dasar laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

**Tabel 2.** PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Banten Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota	Rata-Rata PDRB Per Kapita (Rp)	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
1. Pandegelang	6.811.762	5,32
2. Lebak	6.284.910	5,28
3. Tanggerang	11.665.175	5,85
4. Serang	8.505.755	4,32
5. Kota Tangerang	29.335.876	6,50
6. Kota Cilegon	65.056.689	5,49
7. Kota serang	8.969.716	6,63
8. Kota Tangerang Selatan	8.382.000	8,54
Banten	7.522.585	5,80

Sumber: Data BPS, diolah tahun 2012.

Tabel 2 menyajikan gambaran mengenai PDRB per kapita daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten dari tahun 2007-2011 dan tingkat pertumbuhan ekonominya. Dari Tabel 2 tampak bahwa Kota Cilegon memiliki tingkat PDRB per kapita tertinggi atau 10 kali lipat dari PDRB per kapita dari daerah yang paling rendah (Lebak). Dari sisi pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu yang sama, Kota Tangerang Selatan memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi walaupun secara administratif baru terbentuk pada tahun 2009. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah ada di Kabupaten Serang.

Kondisi PDRB dan pertumbuhan ekonomi dari daerah di wilayah Banten dapat dianalisis dengan Klassen seperti tergambar pada Tabel 3. Dengan menggunakan analisis Klassen data PDRB dan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Banten memberikan penjelasan lebih jauh mengenai tipologi perkembangan pembangunan dari daerah kabupaten/kota di wilayah Banten. Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang masuk kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Dalam analisis Klassen kondisi PDRB dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandegelang dan Lebak masuk kategori daerah relatif tertinggal. Kota Cilegon masuk kategori daerah berkembang cepat. Sedangkan Kabupaten Serang masuk ke dalam kategori daerah maju dan lamban tumbuh.

Perspektif ketimpangan regional yang diukur dengan indeks entropi *Theil* yang disajikan pada Tabel 4. Secara rata-rata Indeks entropi *Theil* Banten tahun 2007-2011 adalah 3,96. Angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan yang sangat tinggi. Ketimpangan regional terbesar terjadi di Kota Cilegon dan ketimpangan regional terendah di Kabupaten Lebak. Perbedaan yang terbesar dengan yang terkecil mencapai 20 kali lipatnya. Angka indeks yang sampai empat digit menjauh dari nol tersebut lebih tinggi dibanding daerah lain seperti NTB dan Riau yang secara rata-rata antara 1 dan 2 sedangkan Jambi di bawah 1.

**Tabel 3.** Tipologi Perkembangan Pembangunan di Provinsi Banten

$r \backslash y$	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang</li> </ul>	Daerah berkembang cepat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Cilegon</li> </ul>
$r_i < r$	Daerah maju tapi lamban tumbuh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Serang</li> </ul>	Daerah relatif tertinggal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pandegelang dan Lebak</li> </ul>

**Tabel 4.** Indeks Entropi *Theil* di Provinsi Banten Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota		2007	2008	2009	2010	2011	Rata-Rata
1.	Pandegelang	0,71	0,82	0,87	0,84	0,89	0,83
2.	Lebak	0,59	0,70	0,73	0,84	0,89	0,71
3.	Tangerang	0,92	1,01	1,02	1,10	0,95	1,00
4.	Serang	0,82	0,91	1,11	0,99	1,07	0,98
5.	Kota Tangerang	5,19	5,37	5,68	5,14	5,47	5,37
6.	Kota Cilegon	15,36	17,13	18,31	24,59	25,66	20,21
7.	Kota Serang	-	-	1,68	1,57	1,68	1,64
8.	Kota Tangerang Selatan	-	-	-	0,71	1,12	0,92
Provinsi Banten		3,93	4,32	4,20	4,47	4,72	3,96

Sumber : Data BPS 2012, diolah.

Berdasarkan persandingan antara tipologi Klassen di Provinsi Banten dengan ketimpangan regional tahun 2007-2011 (Tabel 5), terlihat bahwa di daerah cepat maju dan cepat tumbuh (Kota Tangerang dan Kota Serang) dan daerah berkembang cepat (Kota Cilegon) terdapat ketimpangan regional yang besar. Daerah maju tapi lamban tumbuh (Kabupaten Serang) dan daerah relatif tertinggal (Kabupaten Lebak dan Pandegelang) terdapat ketimpangan regional yang kecil. Kota Tangerang Selatan yang baru dimekarkan dari Kabupaten Tangerang pada tahun 2009 sebagai daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh memiliki tingkat ketimpangan yang kecil.

Daerah cepat maju dan cepat tumbuh kecuali Tangerang Selatan dan daerah berkembang cepat di Provinsi Banten memiliki ketimpangan yang besar. Hal ini menunjukkan hubungan antara pendapatan per kapita yang tinggi dengan ketimpangan regional.

**Tabel 5.** Perbandingan Tipologi Klassen dan Ketimpangan Regional di Provinsi Banten 2007-2011

Tipologi Klassen	Indeks Entropi <i>Theil</i>	
	IET < 1	IET > 1
Daerah cepat maju dan cepat tumbuh	Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang
		Kota Serang
		Kab. Tangerang
Daerah maju tapi lamban tumbuh	Kabupaten Serang	
Daerah berkembang cepat		Kota Cilegon
Daerah Relatif Tertinggal	Kabupaten Pandegelang	
	Kabupaten Lebak	

Sumber: BPS diolah 2012.

Kota Cilegon dan Kota Tangerang secara tajam menunjukkan perbedaan karakteristik ekonominya dengan daerah lainnya di Banten, karena angka ketimpangan regional yang tinggi. Kota Cilegon dan Kota Tangerang yang menjadi daerah industri dan jasa memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi dan secara langsung menghasilkan pendapatan per kapita tinggi, namun sekaligus memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi secara regional. Ini menunjukkan sebagai kota industri, nilai produksi (PDRB) yang tinggi tidak secara bersamaan pendapatan per kapita tidak terbagi secara merata. Hal ini disebabkan industri banyak dimiliki pemodal dari luar Banten dan produknya diekspor sehingga pendapatan perkapita tidak terdistribusi secara merata ke daerah Banten.

Sedangkan daerah-daerah tertinggal (Lebak dan Pandegelang) secara umum memiliki ketimpangan yang rendah juga memberikan gambaran pendapatan per kapita yang rendah merata di kabupaten tersebut. Hal ini disebabkan pendapatan per kapita penduduknya mengandalkan dari produk pertanian berbeda dengan daerah industri di Banten. Sedangkan daerah maju tapi lamban tumbuh (Kabupaten Serang) memiliki ketimpangan yang rendah karena secara umum masih mengandalkan pertanian.

## B. Pola Perkembangan Ekonomi dan Ketimpangan di Provinsi Gorontalo

Perkembangan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo seperti disajikan pada Tabel 6. Kabupaten Pohuwato memiliki PDRB per kapita tertinggi dan terendahnya adalah Kabupaten Bone Bolango. Dari sisi pertumbuhan dalam tahun 2007-2011, pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo, sedangkan terendah di Kabupaten Bone Bolango.

**Tabel 6.** PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2011

No.	Kabupaten/ Kota	Rata-Rata PDRB Per Kapita (Rp)	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
1.	Boalemo	2.441.315	7,01
2.	Gorontalo	2.316.973	7,57
3.	Pohuwato	4.043.037	7,38
4.	Bone Bolango	1.951.823	6,45
5.	Gorontalo Utara	1.994.946	7,50
6.	Kota Gorontalo	3.267.285	7,51
	Provinsi Gorontalo	2.723.148	7,24

Sumber: BPS diolah 2012.

Kondisi PDRB dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Gorontalo dalam analisis Klasen menghasilkan tipologi seperti tampak pada Tabel 7. Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo masuk kategori daerah cepat tumbuh dan maju. Kabupaten Gorontalo Utara dan Gorontalo masuk kategori berkembang cepat. Sedangkan Kabupaten Boalemo dan Bone Bolango masuk dalam kategori daerah tertinggal. Dalam kurun waktu tahun 2007-2011 ini tidak ada daerah di Gorontalo menurut tipologi Klasen masuk sebagai daerah maju tapi lambat tumbuh.

Dalam perspektif ketimpangan regional yang diukur dalam indeks entropi *Theil* seperti tampak dalam Tabel 8, diperoleh gambaran bahwa indeks entropi *Theil* Gorontalo tahun 2007-2011 adalah 0,85. Angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah dibandingkan dengan Banten, bahkan dari NTB, Riau, dan Jambi. Ketimpangan regional terbesar terjadi di Kabupaten Pohuwato dan terendah di kabupaten Gorontalo.

**Tabel 7.** Tipologi Perkembangan Pembangunan Daerah Gorontalo

r \ y	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo</li> </ul>	Daerah berkembang cepat: <ul style="list-style-type: none"> <li>Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo</li> </ul>
$r_i < r$	Daerah maju tapi lamban tumbuh: <ul style="list-style-type: none"> <li>--</li> </ul>	Daerah relatif tertinggal: <ul style="list-style-type: none"> <li>Boalemo dan Bone Bolango</li> </ul>

**Tabel 8.** Indeks Entropi *Theil* di Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2011

No.	Kabupaten/ Kota	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-Rata
1.	Boalemo	0,77	0,76	0,77	0,79	0,86	0,79
2.	Gorontalo	0,37	0,29	0,36	0,35	0,39	0,35
3.	Pohuwato	1,72	1,75	1,76	1,54	1,72	1,70
4.	Bone Bolango	0,55	0,56	0,56	0,50	0,54	0,54
5.	Gorontalo Utara	0,65	0,68	0,69	0,63	0,68	0,66
6.	Kota Gorontalo	1,06	1,08	1,05	1,00	1,09	1,06
	Provinsi Gorontalo	0,85	0,86	0,87	0,80	0,88	0,85

Sumber: Data BPS 2012, diolah.

Berdasarkan persandingan antara hasil analisis Klasen antardaerah di Provinsi Gorontalo dengan ketimpangan regional tahun 2007-2011 pada Tabel 9 menggambarkan bahwa daerah maju dan cepat tumbuh (Kota Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato) memiliki indeks ketimpangan di atas 1 atau paling tinggi diantara daerah lainnya. Sedangkan daerah berkembang cepat (Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara) dan daerah tertinggal (Kabupaten Boalemo dan Bone Bolango) memiliki indeks entropi di bawah 1. Gambaran ketimpangan yang besar di daerah maju dan cepat tumbuh di Gorontalo sejalan dengan gambaran di Provinsi Banten yang berarti menunjukkan adanya hubungan antara tingginya tingkat pendapatan per kapita dengan ketimpangan regional. Kabupaten Pohuwato memiliki pendapatan per kapita yang tinggi karena memiliki basis ekonomi yang tinggi pada produk perkebunan dan pertambangan dengan wilayah yang paling luas dan jumlah penduduk yang relatif rendah menyebabkan per kapita Kabupaten Pohuwato tertinggi. Selain itu, peran dari transmigran yang memiliki etos kerja yang baik menyebabkan tingkat produktivitas yang tinggi dari Kabupaten Pohuwato. Sedangkan Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi kemajuan pembangunannya didukung oleh aktivitas pemerintahan yang mendominasi kegiatan ekonomi masyarakatnya.

Namun, sebagai provinsi hasil pemekaran, dan kabupaten hasil pemekaran seperti Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara yang masuk kategori berkembang cepat memiliki Indeks entropi *Theil* di bawah 1 yang menunjukkan ketimpangan yang relatif rendah, dibanding daerah

di Banten, daerah dalam kategori ini memiliki ketimpangan yang tinggi. Kedua kabupaten di Gorontalo yang berkembang cepat dengan Indeks entropi *Theil* yang rendah kemungkinan dipengaruhi oleh masih dominannya sektor pertanian sebagai lapangan kerja utama, seperti tergambar dari angkatan kerja tahun 2012-2013 yang bekerja di sektor pertanian di Kabupaten Gorontalo mencapai 39 persen dibanding sektor industri hanya 15 persen dan jasa 13 persen (BPS Kabupaten Gorontalo, 2014). Sedangkan daerah tertinggal (Bone Bolango dan Boalemo) di Gorontalo memiliki tingkat ketimpangan yang rendah walaupun secara ketimpangan regionalnya lebih tinggi dari daerah Kabupaten Gorontalo yang masuk kategori daerah berkembang cepat. Boalemo memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dibanding dengan Gorontalo Utara. Ini menunjukkan walaupun tertinggal Boalemo memiliki persoalan dalam pemerataan pendapatan per kapita.

### C. Perkembangan Ekonomi dan Ketimpangan Daerah Hasil Pemekaran

Dari analisis *Klassen* dan *Theil* terhadap dua Provinsi hasil pemekaran menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan diantara kedua provinsi tersebut. Persamaannya ketimpangan terendah ada di daerah yang masuk kategori tertinggal sedangkan ketimpangan tertinggi terjadi di daerah maju dan cepat tumbuh. Pola ini memberikan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan adanya gravitasi ekonomi atau pemusatan pertumbuhan, sehingga daerah yang maju juga akan mengalami percepatan pertumbuhan. Namun dalam kacamata ketimpangan, pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan pemerataan. Ini menyebabkan di daerah hasil

**Tabel 9.** Perbandingan Tipologi *Klassen* dan Ketimpangan Regional di Provinsi Gorontalo 2007-2011

Tipologi <i>Klassen</i>	Indeks Entropi <i>Theil</i>	
	IET < 1	IET > 1
Daerah cepat maju dan cepat tumbuh		Kota Gorontalo
		Kab. Pohuwato
Daerah maju tapi lamban tumbuh		
Daerah berkembang cepat	Kab. Gorontalo	
	Kab. Gorontalo Utara	
Daerah relatif tertinggal	Kab. Boalemo	
	Kab. Bone Bolango	

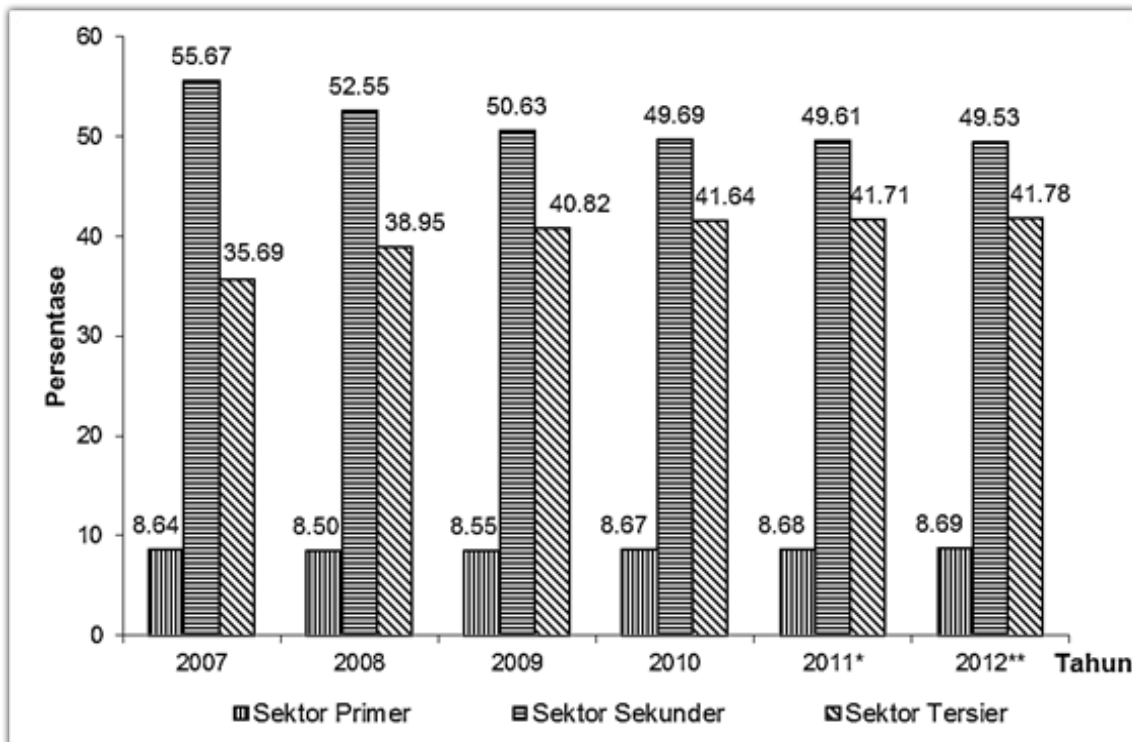
Sumber: BPS diolah 2012

pemekaran sekalipun pola perkembangan ekonomi mengikuti perkembangan yang ada. Pemekaran wilayah yang dimaksudkan untuk memperkecil ketimpangan pada sisi ini sulit mengendalikan ketimpangan, karena daerah-daerah hasil pemekaran sudah membawa pola perkembangan ekonomi yang secara instrinsik dibawa dari daerah induknya.

Tingkat ketimpangan Gorontalo lebih baik dibanding Banten. Pola ketimpangan Gorontalo setipe dengan ketimpangan daerah di luar pulau Jawa seperti di NTB, Jambi, dan Riau yang masih di angka digit 1 atau di bawahnya. Sedangkan ketimpangan di Banten keluar dari pola tersebut. Sebagai daerah hasil pemekaran dari Jawa Barat, pola ketimpangannya merupakan bawaan kondisi geografis ekonomi sebelum pemekaran. Kota Cilegon dan Kota Tangerang yang angka *Theil*-nya tinggi memiliki peran berbeda dalam konteks pertumbuhan ekonomi wilayah Banten. Khususnya Cilegon dengan PDRB yang tinggi jumlah pembagi atau penduduknya paling kecil di antara daerah lainnya di Banten. Kondisi ini menyebabkan angka ketimpangan regional yang tinggi disebabkan struktur ekonomi dan penduduk Kota Cilegon berbeda jauh dengan daerah lainnya di Banten. Kota Tangerang karakteristiknya mendekati Kota Cilegon, namun jumlah penduduknya yang besar sehingga walaupun angka *Theil*-nya tinggi tapi tidak setinggi Kota Cilegon.

Ketimpangan yang tinggi bisa dijelaskan juga dengan melihat struktur PDRB Banten yang pada tahun 2007-2011 (Gambar 1) yang mencerminkan karakteristik daerah industri dengan sumbangan sektor usaha sekunder (industri manufaktur, bangunan listrik, dan air bersih) mencapai 54,80 persen, sektor usaha tersier (transportasi, keuangan, dan jasa-jasa) 37,14 persen dan sektor primer (pertanian dan pertambangan) 8,06 persen. Selain itu Gambar 1 menggambarkan perkembangan dan kecenderungan dari kontribusi sektor usaha di Banten, di mana menggambarkan dominannya perkembangan sektor usaha sekunder yang bertumpu pada industri manufaktur. Dominannya sektor manufaktur dan penyebaran penduduk memperkuat yang tidak seimbang, di mana PDRB Cilegon yang tinggi sedangkan penduduknya paling kecil di antara daerah lainnya di Banten menyumbangkan terbentuknya pemusatan ekonomi dan ketimpangan pembangunan. Kondisi tersebut menyebabkan PDRB yang besar sumbangan manufaktur tidak terdistribusi secara seimbang atau dinikmati secara merata oleh penduduk Banten yang mayoritas penduduk Banten tinggal di luar Cilegon.

Berbeda dengan struktur PDRB Banten, struktur PDRB Provinsi Gorontalo, yang pada awal pembentukan provinsi mencapai lebih dari 30



Sumber: RKPDP Provinsi Banten.

**Gambar 1.** Kontribusi Sektor PDRB Harga Berlaku dalam Struktur Perekonomian Provinsi Banten Tahun 2007-2011

persen, berasal dari sektor pertanian dan sektor jasa, terutama jasa pemerintahan yang mencapai 25 persen dan perkembangannya, berubah pada tahun 2013 menurun menjadi 28 persen (BPS Provinsi Gorontalo, 2014: 14-16). Struktur PDRB Gorontalo berbeda dengan Banten di mana sektor pertanian hanya berkontribusi sebesar 8 persen. Struktur PDRB Gorontalo tersebut memperkuat distribusi pendapatan karena mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan penggerak ekonomi masih bertumpu pada belanja pemerintah karena kontribusinya yang besar setelah pertanian. Sedangkan Kabupaten Pohnpei memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena merupakan daerah dengan wilayah pertanian yang paling luas dan dengan jumlah penduduk yang kepadatan paling rendah. Sedangkan Kota Gorontalo mengandalkan pada aktivitas pemerintahan, di mana kontribusi jasa pemerintahan mencapai 25 persen dari PDRB-nya.

Daerah hasil pemekaran dalam konteks pertumbuhan ekonomi, ketika struktur ekonominya sudah berkembang pada basis industri, tingkat ketimpangannya menjadi tinggi, berbeda dengan daerah yang masih bertumpu pada sektor pertanian. Hal ini disebabkan ketika daerah PDRB-nya terbesar dari sektor industri tidak sejalan dengan mayoritas penduduknya yang bekerja di sektor pertanian. Sebaliknya daerah yang masih mengandalkan sektor pertanian dan penduduknya bekerja di sektor tersebut memiliki angka ketimpangan regional yang

rendah.

Kondisi ketimpangan Gorontalo jauh lebih rendah dari Banten. Hal ini bukan karena efektivitas dari kebijakan pemekaran sehingga pemerintah daerah hasil pemekaran mempunyai kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk mengendalikan ketimpangan, namun pola pertumbuhan ekonominya sesuai dengan struktur distribusi tenaga kerjanya yang masih dominan bekerja di sektor pertanian. Pengaruh tersebut bisa dilacak dari pandangan Bappeda Gorontalo<sup>4</sup>, ketika daerah melihat kebijakan pemekaran dapat mempercepat pemerataan pembangunan, karena pemekaran dapat memenuhi kebutuhan fiskal daerah yang tertinggal. Daerah yang dimekarkan akan meningkat status administrasinya dan memungkinkan untuk meningkatkan kapasitas belanja pembangunan dalam rencana pembangunannya. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi pada pengembangan komoditas unggulan di sektor pertanian sejalan dengan masih dominannya sektor pertanian sebagai lapangan kerja utama masyarakat Gorontalo.

Kondisi berbeda dihadapi oleh Banten, yang pemerintahan daerah hasil pemekaran menghadapi realitas bahwa Banten sudah terbentuk pemusatan ekonomi dan pembangunannya menjadi daerah pusat industri dan pertanian. Pemerintah daerah

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bappeda Provinsi Gorontalo 15 April 2014.

Banten tidak bisa dengan mudah memberikan prioritas pembangunan pada sektor tertentu, seperti di Gorontalo. Sejumlah kota di wilayahnya seperti Kota Tangerang, Cilegon, dan Kabupaten Tangerang telah berkembang menjadi kota industri dan jasa, namun Kabupaten Pandegelang pengembangannya berhadapan dengan realitas sebagian besar daerahnya adalah kawasan hutan lindung, sehingga secara tata ruang dan wilayah tidak memiliki potensi untuk dipromosikan maupun dikembangkan sebagaimana kota industri lainnya di Banten. Keterbatasan tersebut, menurut Bappeda Pandegelang<sup>5</sup> dari 141 desa di Pandegelang ada 131 desa dalam kategori tertinggal. Pemerintah Banten belum mampu membangun konektivitas ekonomi antara daerah industri dengan daerah sekitarnya yang berbasis pada pertanian, sehingga kinerja PDRB dan pendapatan per kapita yang tinggi di daerah industri tidak memiliki pengaruh pada daerah pertanian di sekitarnya. Kenyataan tersebut memperkuat gambaran ketimpangan dari sisi ruang diantara wilayah yang ada di Banten.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Pemekaran memberikan kesempatan kepada daerah hasil pemekaran kewenangan untuk membangun daerahnya, terutama mengatasi kesenjangan antardaerah. Dari studi daerah pemekaran Provinsi Banten dan Provinsi Gorontalo diperoleh gambaran bahwa ketimpangan di Provinsi Banten dalam indeks *Theil* sangat tinggi dibanding Provinsi Gorontalo. Indeks entropi *Theil* Provinsi Banten paling tinggi dibanding provinsi lainnya yang bukan daerah hasil pemekaran. Dibanding Provinsi Gorontalo, yang sama-sama sebagai daerah hasil pemekaran, angka ketimpangan Banten sangat tinggi. Pengaruh struktur ekonomi wilayah di Jawa berpengaruh cukup kuat terhadap ketimpangan di Provinsi Banten. Faktor tersebut bisa dijelaskan dari angka ketimpangan Provinsi Gorontalo sebagai pembanding memiliki angka yang hampir sama dengan Provinsi lain di luar Pulau Jawa, yang mayoritas bukan hasil pemekaran.

Dari Provinsi Gorontalo, penelitian ini melihat bahwa prioritas pembangunan dari pemerintah daerah yang menyesuaikan dengan potensi ekonomi daerah dan masyarakatnya sebagian menentukan keberhasilan dalam mengatasi ketimpangan antarwilayah. Sedangkan kondisi struktur ekonomi yang membentuk pemusatan ekonomi saat suatu daerah belum menjadi daerah yang dimekarkan

menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan daerah yang dilahirkan dari hasil pemekaran. Struktur ekonomi yang dibawa dan mengandung potensi ketimpangan sebagaimana dihadapi oleh Provinsi Banten menjadi tantangan pemerintah daerahnya dalam membangun konektivitas ekonomi antarwilayahnya, terutama dalam mengatasi persoalan ketimpangan.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan dan kelemahan. Keterbatasan dari penelitian ini ada pada tingkat pembandingan daerah yang masih terbatas pada perbandingan tingkat provinsi. Tentunya diperlukan pembandingan antara daerah kabupaten/kota untuk memperoleh variabel baru yang lebih bisa menjelaskan fenomena ketimpangan pembangunan. Pembandingan dilakukan antarkabupaten/kota yang memiliki kategori yang sama tentunya diharapkan dapat memperoleh faktor penyebab ketimpangan dan perbedaan kinerja ekonomi dalam payung otonomi daerah atau sebagai daerah pemekaran. Selain itu penelitian memiliki kelemahan karena baru sebatas menunjukkan adanya persoalan kinerja ekonomi dan ketimpangan dari daerah hasil pemekaran, namun belum secara jauh mengungkap faktor-faktor penyebabnya.

### B. Saran

Dalam menjalankan kebijakan desentralisasi dalam bentuk pemekaran daerah, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek pemusatan ekonomi dari sisi ruang dari daerah yang akan dimekarkan. Daerah yang telah menjadi pusat industri cenderung tumbuh lebih cepat sedangkan daerah dengan mengandalkan pertanian cenderung lambat namun dengan tingkat ketimpangan yang rendah. Apabila pertimbangan pemusatan ekonomi diabaikan, maka kecenderungan tuntutan untuk pemekaran daerah yang tertinggal akan meningkat. Pada akhirnya kebijakan pemekaran yang pada mulanya dimaksudkan untuk mengatasi ketidakpuasan akibat ketimpangan akan menciptakan ketimpangan baru karena daerah pemekaran gagal dalam pemeratakan pusat pertumbuhan atau membangun konektivitas antara pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bappeda Kabupaten Pandegelang 7 Mei 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bappenas dan UNDP. (2008). *Studi evaluasi dampak pemekaran daerah 2001-2007*. Jakarta: BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance).

BPS Provinsi Gorontalo. (2014). *Potensi pertanian Provinsi Gorontalo-analisis hasil pendataan sensus pertanian 2013*. Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo.

Rondinelli, Dennis A. and Cheema, G. Shabbir. (1983). *Implementing decentralization policies: an introduction, in Decentralization and development, policy implementation in developing countries*. California: Sage Publications Inc.

Kuncoro, Mudradjad. (2009). *Ekonomika Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Kuncoro, Mudradjad. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah*. Jakarta: Erlangga.

Litvack, J., Ahmad, J., and Bird, R. (1998). *Rethinking decentralization in developing countries*. Washington DC. The World Bank.

Ratnawati, Tri., Salamm, Alfitra., dan Letty Azis, Nyimas Latifah. (2007). *Persepsi lokal dan implementasi UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Jakarta: LIPI Press.

### Jurnal

Acemoglu, Daron and Robinson, James A. (2002). The political economy of Kuznets Curve. *Review of Development Economics*, 6(2), 183-203.

Akita, T. and Alisjachbana, A. S. (2002). Regional income inequality in Indonesia and the initial impacts of the economic crisis. *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, 38(2), 201-222.

Aswandi, H. dan Kuncoro, Mudradjad. (2002). Evaluasi penetapan kawasan andalan: studi empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 17(1), 27-45.

Booth, A. (2000). Poverty and inequality in the Suharto era: an assessment. *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, 36(1), 73-104.

Caska dan Riadi, R. M. (2008). Pertumbuhan dan ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah di Provinsi Riau. *Jurnal Industri dan Perkotaan*, Volume XII (21), 1.629-1.642.

Fitriani, F., Hofman, Bert dan Kaser, Kai. (2005). Unity in diversity? the creation of new local government in a decentralising Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(1), 57-79.

Meilani, Hilma dan Wuryandani, Dewi. (2012). Pola perkembangan ekonomi dan ketimpangan regional di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3(2), 203-214.

Leigh, Andrew and Pierre, van der Eng. (2009). Inequality in Indonesia: what can we learn from top incomes?. *Journal of Public Economics* 93, pp. 209-212.

Prud'homme, Remy. (1995). The dangers of decentralization. *The World Bank Research Observer*, 10(2), 201-220.

Sufirmansyah. (2012). Dampak Kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan antardaerah, dan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, V(2), 106-125.

Gurgur, Tugrul and Shah, Anwar. (2014). Localization and corruption: panacea or pandora's box?. *Annals of Economics and Finance, Society for AEF*, 15(1), 109-136.

Umiyati, Etik. (2012). Analisa tipologi pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan dalam implementasi otonomi daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(5), 15-21.

### Laporan

Departemen Dalam Negeri. (2005). *Efektifitas pemekaran wilayah di era otonomi daerah*. (Sinopsis Penelitian). Jakarta: Pusat Litbang Otonomi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri.

Lembaga Administrasi Negara. (2005). *Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah periode 1999-2003*. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara.